

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam organisasi atau perkumpulan di masyarakat. Pada masyarakat modern, organisasi yang besar dan kompleks banyak bermunculan, dimana salah satu organisasi yang sangat penting adalah organisasi pemerintahan. Di dalam Negara terdapat susunan organisasi pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkatan lokal. Dalam susunan organisasi pemerintahan, kepemimpinan tertinggi dari eksekutif dalam susunan pemerintahan adalah presiden dan sampai pada level dibawahnya dalam struktur pemerintahan adalah kepala desa. Kepala desa dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa, sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya, berkembang atau tidaknya pembangunan di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 “kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”. Sebagai kepala organisasi pemerintahan desa, kepala desa memiliki kedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga keberhasilan pembangunan suatu

desa tidak terlepas dari peran penting kepala desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan.

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1). Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2). Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3). Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- 4). Menetapkan peraturan desa;
- 5). Membina kehidupan masyarakat;
- 6). Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 7). Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 8). Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 9). Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 10). Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, serta;
- 11). Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dominannya peran kepala desa atau pemimpin dalam sistem sosial pada masyarakat Indonesia membuat posisi kepala desa sangatlah penting. Sehingga masyarakat sering menjadikan kepala desa bukan hanya sebagai pimpinan pemerintahan desa tetapi juga sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan

yang terjadi di masyarakat. Seperti urusan sosial politik, urusan kemasyarakatan, bahkan urusan atau masalah rumah tangga.

Dalam masyarakat desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu idealnya dalam memilih calon kepala desa masyarakat harus berpartisipasi dan benar-benar selektif dalam memilih kepala desa yang memiliki kemampuan memimpin.

Pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota dengan mempertibangkan jumlah desa serta kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dapat dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah. Pada pasal 32 dijelaskan tentang pencalonan dan pemilihan kepala desa, yang diawali dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Lembaga penyelenggara pemilihan kepala desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD membentuk panitia pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemilihan kepala desa dilakukan melalui tahapan penjurangan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pengumuman suara, dan penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Calon kepala desa terpilih tersebut kemudian diajukan oleh ketua panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama tujuh hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih, kemudian setelah menerima laporan dari panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati/walikota paling lama tujuh hari.

Di Kabupaten Halmahera Timur pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa mengenai pencalonan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017. Pada Pasal 22 dijelaskan penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (Dua) orang dan paling banyak 5 (orang). Dan masa pendaftaran calon kepala desa paling lama 9 (Sembilan) hari, dan apabila bakal calon kurang dari 2 (Dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (Dua Puluh) hari. Dan sampai tenggang waktu yang diberikan tersebut telah habis maka Bupati menunda pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Dalam pemilihan kepala desa tidak lepas dari dinamika perkembangan politik lokal. Dalam pemilihan kepala desa tersebut terjadi perebutan kekuasaan yang lazim terjadi di setiap putaran pemilu di Indonesia. Para calon-calon kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan kepala desa agar dapat memenangkan kursi kekuasaan di desa. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa tersebut para kandidat menggunakan strategi kampanye maupun strategi lainnya yang kadang-kadang mengandung kecurangan untuk memenangkan pemilihan. Seperti praktik membeli suara/Politik Uang (*Money Politic*), mencuri start kampanye, kampanye gelap (*Black Campaign*). Pemalsuan ijazah atau data-data lainnya.

Pentingnya kedudukan politik kepala desa, baik dalam artian administratif maupun politik kekuasaan, jabatan di desa dapat menjadi naik atau turunnya status sosial di masyarakat. Pejabat desa mempunyai kekuasaan atau sumber-sumber ekonomi desa, mempunyai pengaruh dalam melakukan pelayanan sosial dan pembangunan. Sehingga kekuasaan, kekayaan dan kedudukan sosial di desa cukup menjadi alasan adanya persaingan dalam pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa secara langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di desa, dimana masyarakat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih kandidat yang akan didukungnya, sehingga kandidat tersebut harus berusaha untuk mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dengan cara adu strategi politik dalam

berkampanye tentang Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh para calon kepala desa tersebut.

Strategi politik yang digunakan oleh para calon pemimpin itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan segala rencana yang telah disusun, kemudian menjadisatu fokus utamadalam perolehan suara terbanyak sebagaibentuk kemenangan untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan inilah yang menjadi tujuan dari sebuah strategi karena merupakan kemenangan politik yang dapat digunakan dalam sebuah sistem politik.

Terlepas dari hitam putihnya suatu pemilihan kepala desa, penulis menyoroti pemilihan kepala desa di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur karena ada beberapa faktor yang menarik dalam pemilihan kepala desa Gotowasi pada tahun 2017. *Pertama*, Desa Gotowasi yang berada di Kabupaten Halmahera Timur untuk pertama kalinya mengikuti dan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. *Kedua*, adapun dulu masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa mempunyai anggapan bahwa anak kepala desa atau yang memiliki ikatan darah dengan kepala desa sebelumnya akan mewarisi jabatan tersebut walaupun prosesnya melalui pemilihan umum. *Ketiga*, hal lain yang menarik dari pemilihan di desa Gotowasi ini adalah darike 4 (empat) calon terdapat 3 (tiga) calon yang dulu merupakan mantan kepala desa atau sudah pernah menjabat sebagai kepala desa Gotowasi dan terdapat 1 (satu) calon yang belum pernah menjabat dan memenangi pemilihan kepala desa Gotowasi pada tahun 2017 yaitu Mujid H. Hajarat. Adapun perolehan perhitungan suaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa Gotowasi

NoUrut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1	M. Kisan Derek	50 suara
2	Nadi Ayub	211 Suara
3	Mujid H. Hajarat	370 Suara
4	Junaid M. Nur	172 Suara

Sumber : Data PPS desa Gotowasi

Observasi pendahuluan yang telah dilakukan ternyata didapatkan fakta bahwa faktor keturunan/darah dari kepala desa bukan jaminan seseorang menjadi kepala desa, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Mujid H. Hajarat sebagai kepala desa Gotowasi, suara mayoritas penduduk menginginkan perubahan atas pembangunan desanya yang selama ini belum dirasakan oleh mereka, antara lain dalam hal pembangunan insfrastruktur, pembinaan masyarakat desa khususnya dalam kepemudaan, religi/keagamaan serta masalah pendidikan.

Meskipun baru mencalonkan diri sebagai kepala desa, Mujid H. Hajarat mampu mengungguli perolehan suara dari ke tiga kandidat lainnya. Sehingga menarik untuk mengetahui strategi yang digunakan dipemilihan kepala desa Gotowasi dengan judul **“STRATEGI PEMENANGAN KEPALA DESA TERPILIH DESA GOTOWASI TAHUN 2017” (Studi Kasus Di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemenangan kepala desa terpilih di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji strategi pemenangan pemilihan kepala desa terpilih di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan kajian mengenai demokrasi ditingkat Desa dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan atau saran serta gagasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur

E. Landasan Teori

1. Strategi Pemenangan

a. Pengertian Strategi

Menurut Arnold Steinberg (dalam Pito,2006:196) strategi adalah rencana atau tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Sebuah strategi yang disusun berdasarkan pada data yang salah atau tidak cermat, cenderung gagal, seperti juga strategi yang cerdas dan berbobot yang dilaksanakan secara ceroboh juga akan gagal. Jadi dengan kata lain strategi adalah suatu rencana yang dibuat oleh calonkandidat agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah pemilihan.

Strategi adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Nimmo, 2005). Tujuan akhir dalam kampanye pemilihan kepala daerah adalah untuk memenangkan pasangan calon yang didukung oleh tim kampanye politiknya untuk menduduki suatu jabatan kepala daerah yang diperebutkan dengan melalui mekanisme sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Agar suatu tujuan akhir tersebut bisa dicapai, maka diperlukan strategi yang matang untuk memenangkan perolehan suara terbanyak.

Strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh sesuatu yang ingin dicapai, atau proses penentuan rencana dari seorang pemimpin

puncak atau atau kandidat yang bertujuan pada jangka panjang, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. strategi merupakan tindakan yang senantiasa berkembang atau meningkat sedikit demi sedikit secara teratur, serta dilakukan dari sudut pandang yang diharapkan oleh masyarakat dimasa depan. Dapat disimpulkan strategi adalah pendekatan dalam mengelola kegiatan, dengan mengintegrasikan komponen urutan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyusunan strategi.

Menurut Gregory dalam Venus (2004;145) tahapan dalam perencanaan strategi kampanye adalah :

- a) Analisis masalah
- b) Penyusunan tujuan
- c) Identifikasi dan segmentasi sasaran
- d) Menentukan pesan
- e) Taktik (perencanaan program)
- f) Alokasi waktu dan sumber daya
- g) Evaluasi dan tinjauan

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

b. Strategi Kampanye

Strategi Kampanye merupakan cara yang digunakan oleh calon maupun tim pemenangan untuk melakukan analisis, perencanaan, implementasi yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan yang menguntungkan antara calon dan pemilih demi tujuan untuk mencapai komunikasi politik yang baik. Pada hakikatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik (Istyanto,2011: 68). Menurut Graber memandang bahwa komunikasi politik adalah proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan, struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan komunikasi politik adalah pembicaraan untuk mempengaruhi masyarakat dalam pencitraan, pesan, dialog atau tindakan politik dalam pencitraan menjelang pemilihan (Istyanto, 2011:73)

Kampanye adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dampak tertentu pada sejumlah besar orang dalam jangka waktu tertentu melalui satuan kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan baik. (Rogers dan Storey dalam Venus 2004 :7) Mengatakan bahwa ada empat hal yang harus terkandung dalam aktifitas kampanye yaitu :

- a) Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
- b) Jumlah khalayak yang besar

c) Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.

d) Melalui serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi.

Dari definisi yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan jika strategi kampanye adalah sebuah penyusunan rencana yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai maksud tertentu dalam mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dalam penentuan strategi kampanye dibutuhkan sebuah perencanaan kampanye. Dalam penyusunan rencana, perencanaan kampanye biasanya disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar pesan komunikasi yang mereka lakukan pada audience dapat tersampaikan dengan baik.

Ada beberapa model kampanye yang sering digunakan adalah *Model The Five Functional Stages Development* model ini dikembangkan oleh tim peneliti dan praktisi kampanye di Yale University Amerika Serikat pada awal tahun 1960-an. Kepopuleran ini tidak terlepas dari fleksibilitas model untuk diterapkan, baik pada *candidate oriented campaign*, *product oriented campaign* atau *cause or idea oriented campaign*.

Fokus dalam model strategi ini adalah tahapan kegiatan kampanye, bukan pada proses pertukaran pesan antara campaigner dengan campaignee. Pada model ini, digambarkan bagaimana tahapan kegiatan kampanye harus dilalui sebelum akhirnya kegiatan tersebut berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan. Dimana tahapan-tahapan kegiatan tersebut meliputi: identifikasi, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi.

a) Tahap identifikasi

Merupakan tahap penciptaan identitas kampanye yang dengan mudah dapat dikenali oleh khalayak. Hal yang umum digunakan untuk kampanye pemilu misalnya logo, lagu dan slogan yang digunakan oleh semua tim pemenangan peserta pemilihan

b) Tahap legitimasi

Dalam kampanye politik, legitimasi diperoleh ketika seseorang telah masuk dalam daftar kandidat calon, atau seorang kandidat memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat.

c) Tahap partisipasi

Tahap ini dalam praktiknya relatif sulit dibedakan dengan tahap legitimasi karena ketika seorang kandidat, mendapatkan legitimasi, pada saat yang sama dukungan yang bersifat partisipatif mengalir dari khalayak. Partisipasi ini dapat bersifat nyata (real) atau simbolik. Partisipasi nyata ditunjukkan oleh keterlibatan orang-orang dalam menyebarkan pamflet, brosur atau poster, menghadiri demonstrasi yang diselenggarakan kandidat. Sedangkan simbolik dinyatakan dengan perbuatan menempelkan stiker atau gambar/poster kandidat.

d) Tahap penetrasi

Pada tahap ini seorang kandidat, sebuah produk atau sebuah gagasan telah hadir dan mendapat tempat dihati masyarakat. Seorang juru kampanye misalnya, telah berhasil menarik simpati masyarakat dan meyakinkan mereka bahwa ia adalah kandidat terbaik dari sekian yang ada.

e) Tahap distribusi atau dapat disebut dengan tahap pembuktian.

Pada tahap ini tujuan kampanye pada umumnya telah tercapai. Kandidat politik telah mendapatkan kekuasaan yang mereka carikan. Bagaimana mereka membuktikan janji-janji mereka saat kampanye. Bila mereka gagal melakukan hal itu maka akibatnya akan fatal bagi kelangsungan jabatan atau gagasan yang telah diterima masyarakat.

Pada model kampanye Nowak dan Warneryd terdapat delapan elemen kampanye yang harus diperhatikan, yakni :

1. Efek yang diharapkan. Efek yang ingin dicapai harus dirumuskan terlebih dahulu secara jelas, dengan demikian penentuan elemen-elemen lainnya akan dengan lebih mudah dilakukan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah terlalu mengagung-agungkan efek kampanye, sehingga efek yang ingin dicapai menjadi tidak jelas dan tidak tegas.
2. Persaingan komunikasi. Agar suatu kampanye menjadi efektif, maka perlu diperhitungkan suatu potensi gangguan dari kampanye yang bertolak belakang (*counter campaign*).
3. Objek komunikasi. Objek kampanye biasanya dipusatkan pada satu hal saja, karena untuk objek yang berbeda menghendaki metode komunikasi yang berbeda. Ketika objek kampanye telah ditentukan, pelaku kampanye akan dihadapkan lagi pada pilihan apa yang akan ditonjolkan atau yang ditekankan pada objek tersebut.
4. Populasi target dan kelompok penerima. Kelompok penerima adalah bagian dari populasi target. Agar penyebaran pesan dapat lebih mudah dilakukan maka penyebaran lebih baik ditujukan kepada opinion leader (pemuka pendapat) dari populasi target. Kelompok penerima dan

populasi target akan diklasifikasikan ke tingkat sulit atau mudahnya mereka dijangkau oleh pesan kampanye. Mereka yang tidak membutuhkan atau tidak terterpapakan kampanye adalah bagian dari kelompok yang sulit dijangkau.

5. Saluran (*The Channel*). Saluran digunakan dapat bermacam-macam tergantung karakteristik kelompok penerima dan jenis pesan kampanye. Media dapat dijangkau hampir seluruh kelompok, namun bila tujuannya adalah mempengaruhi perilaku maka akan lebih efektif bila melakukan melalui saluran antar pribadi.
6. Pesan (*the message*). Pesan dapat dibentuk sesuai dengan karakteristik kelompok yang menerimanya, pesan juga dapat dibagi kedalam tiga fungsi, yakni : Menumbuhkan kesadaran, Mempengaruhi, serta, Memperteguh dan meyakini penerima pesan bahwa pilihan atau tindakan mereka adalah benar.
7. Komunikator/penerima pesan. Komunikator dapat dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya seorang ahli atau seseorang memiliki kedua sifat tersebut. Pendeknya komunikator harus memiliki kredibilitas dimata penerima pesannya
8. Efek yang dicapai. Efek kampanye yang meliputi efek kognitif (perhatian, peningkatan pengetahuan dan kesadaran), afektif (berhubungan dengan perasaan, mood dan sikap) dan konatif (keputusan bertindak dan penerapan).

Untuk menjelaskan strategi pemenangan kepala desa agar lebih operasional, maka penelitian ini menggunakan teori Charles U larson "*The*

five functional stages development” karena teori lebih komprehensif dan lebih sesuai untuk penelitian yang akan dilakukan di desa Gotowasi.

c. Kampanye Politik

Kampanye politik dalam suatu pemilihan umum adalah bagian dari demokrasi, meskipun kritik yang disampaikan melalui karikatur sering memberikan kesantidak baik, tetapi kampanye politik tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak legitimat ataupun tidak bermoral. Kampanye politik merupakan instrumen yang sah, dimana kelompok kepentingan politik berupaya menjelaskan tujuannya kepada masyarakat umum. Kampanye politik mendapatkan legitimasi dari arti pemilu itu sendiri, karena pemilu adalah fondasi kebebasan individu.

Menurut Arnold Steinberg, kampanye politik adalah cara yang digunakan warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka, kampanye politik merupakan usaha yang terkelola, terorganisir untuk mengikhtiarkan orang dicalonkan, dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan resmi. Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat.

Apapun ragam dan tujuannya, upaya perubahan yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan yang biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan masyarakat, kemudian pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu, perubahan sikap untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian

dan keberpihakan khalayak atau masyarakat pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.

Definisi yang paling sering menjadi rujukan bahwa kampanye adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dampak tertentu pada sejumlah besar orang dalam jangka waktu tertentu melalui satuan kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan baik. Rogers dan Storey dalam Venus (2004 :7) Mengatakan bahwa ada empat hal yang harus terkandung dalam aktifitas kampanye yaitu :

- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
- b. Jumlah khalayak yang besar
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu.
- d. Melalui serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi.

Menurut Charles U. Larson (Venus: 2004 ; 11) kampanye dibagi kedalam tigakampanye yaitu :

- a. *Product oriented campaign* (*comercial campaign* atau *corporate campaign*) atau kampanye yang berorientasi pada produk umumnya terjadi didunia bisnis. Motivasi yang mendasarinya adalah keuntungan finansial. Cara yang ditempuh adalah dengan memperkenalkan produk dan melipat gandakan penjualan sehingga didapatkan keuntungan yang diharapkan.
- b. *Candidate Oriented Campaign* atau kampanye yang berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Jenis kampanye ini dapat juga disebut sebagai *political*

campaigns(kampanye politik). Tujuannya antara lain adalah untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan oleh partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan melalui proses pemilihan umum.

- c. *Ideologically or cause oriented campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan sering kali berdimensi perubahan sosial.

Tim kampanye adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pasangan calon yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kampanye. Anggota tim kampanye berasal dari pendukung pasangancalon tersebut. Tugas tim kampanye adalah merumuskan rencana-rencana strategis sebagai bagian dari usaha untuk memenangkan pasangan yang didukungnya. Menurut Roni (2012:45), Komunikator politik adalah orang yang melakukan komunikasi dalam konteks politik kapanpun dan dimanapun menyampaikan pesan-pesan politik, pesan itu disampaikan baik kepada individu, kelompok maupun massa.

Karakteristik komunikator atau juru kampanye dalam kampanye politik adalah berpendidikan tinggi melebihi rata-rata populasi, memiliki status sosial yang lebih tinggi, terlibat aktif dalam politik, memiliki kepercayaan politik, dan berpengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan.

Teknik kampanye merupakan suatu cara yang digunakan tim kampanye dalam suatu tindakan, dimana tim kampanye berusaha untuk mendapatkan

dukungan dan simpati pemilih agar pemilih menjatuhkan pilihannya pada calon yang diusung. Tim kampanye politik menggunakan teknik-teknik kampanye politik yang kemudian diterapkan dalam suatu bentuk kegiatan kampanye politik untuk mempengaruhi pemilih. Imawan (1997) dalam Amir (2006) merumuskan beberapa teknik kampanye politik, yaitu:

1. Kampanye dari rumah ke rumah (*door to door campaign*), yaitu calon kepala daerah mendatangi langsung para pemilih sambil menanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi. Kampanye ini efektif dilakukan pada pemilihan umum tahun 1955, dengan mendatangi orang-orang yang pilihannya dianggap masih ragu dan dapat dibujuk atau diancam untuk mengubah sikap dan pilihan politik mereka.
2. Diskusi kelompok (*group discussion*) dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi kecil yang membicarakan masalah yang dihadapi masyarakat.
3. Kampanye massa langsung (*direct mass campaign*), dilakukan dalam bentuk aktivitas yang menarik perhatian massa, seperti pawai, pertunjukan kesenian dan sebagainya. Teknik inilah yang dilarang dalam kampanye Pemilu 1992, karena selain tidak efektif juga berpotensi menimbulkan bentrokan fisik.
4. Kampanye massa tidak langsung (*indirect mass campaign*), yang dilakukan dengan cara berpidato di radio, televisi atau memasang iklan di media cetak dan elektronik.

2. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Dalam struktur pemerintah di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua, didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara atau kerajaan oleh karena itu mempunyai hak otonom penuh. Pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tertuang dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 nomor 1 bahwasannya, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.(Widjaja, 2003: 3).

b. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa adalah pimpinan desa yang mengatur semua kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, menerima aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan pusat dan daerah, dan melaksanakan koordinasi dalam rangkaian pelaksanaan pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pemerintahan seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 Nomor 4 bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan secara demokratis.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Maria Eni Surasih, 2002: 23).

Pemerintahan desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan desa diartikan sebagai “Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”. (Widjaja, 2003:3)

3. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Sistem pemilihan kepala desa di Indonesia dipilih langsung oleh penduduk desa, calon yang memenuhi syarat serta mempunyai suara terbanyaklah yang menjadi kepala desa. Sejarah pemerintahan di Indonesia hanya kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung baru dilaksanakan mulai pemilu 2004, hal itu merupakan perkembangan baru dalam pemerintahan Indonesia. Pemilihan kepala desa dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik (Kansil, 2005:87)

Menurut Unang Sunardjo (2004:197) kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan

maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sedangkan menurut Ramlan Subakti (2005:81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Lebih lanjut Taliziduhu Ndraha (2001: 92) mengatakan bahwa kepala desa merupakan seorang Presiden desa yang memimpin pemerintahan desa dan membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6

Tahun 2014, Kepala desa dipilih dalam pemilihan umum, bukan ditunjuk oleh pejabat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 31 proses pemilihan itu dapat dipilah berdasarkan tahapan sebelum pemilihan, saat pemilihan, dan setelah pemilihan. Pembahasan mengenai asas-asas atau prinsip pemilihan.prinsip pemilihan kepala desa. *Pertama*, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.Kebijakan pemilihan kepala desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. *Kedua*, Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. *Ketiga*, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Dede Mariana (2008:62) Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin. Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut :

1. Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan
2. Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan kepala desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.

3. Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
4. Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Itu yang menjadi asas-asas pelaksanaan pemilu yang kemudian disingkat *Luber dan Jurdil*. Pemilu seringkali dijadikan tolak ukur kesuksesan negara dengan sistem demokrasi seperti Indonesia.

C. Definisi Konseptual

Berdasarkan penjelasan di atas sebelumnya, agar tidak terjadi keaburan dalam menentukan objek penelitian, maka definisi konseptual yang dapat penulis tawarkan sebagai berikut:

1. Strategi Pemenangan

Strategi pemenangan adalah suatu cara yang sistemis dan tersusun dengan jelas, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenangkan partai politik atau individu yang akan maju didalam

pemilihan umum. Strategi pemenangan ini dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah yang ditempuh oleh partai politik atau individu dalam mensosialisasikan visi, misi dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat baik itu dengan cara ofensif maupun defensif dalam rangka memenangkan di dalam pemilihan

2. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Dalam hal pemilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat”. Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan suara terbanyak diangkat menjadi kepala Desa setelah ditetapkan oleh Badan perwakilan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati. Dalam penelitian ini akan membahas tentang pemilihan kepala desa di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel. Definisi operasional memberikan suatu batasan atau suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur suatu variabel tersebut (Idrus, 2009:81). Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini, Strategi pemenangan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Gotowasi Kecamatan Maba

Selatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017 mengacu pada landasan teori model kampanye yang dikemukakan oleh Charles U Larson yaitu: *The Five Functional Stages Development Model* yang tahapan kegiatan meliputi:

1. Tahap identifikasi

Tahap penciptaan identitas kampanye yang umum misalnya logo, lagu, dan slogan yang digunakan oleh calon dan tim sukses pada Pilkades

2. Tahap legitimasi

Tahap legitimasi diperoleh ketika seseorang telah masuk dalam daftar kandidat, seorang kandidat memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat

3. Tahap partisipasi

Tahap ini partisipasi ini dapat bersifat nyata (real) atau simbolik. Partisipasi nyata ditunjukkan oleh keterlibatan orang-orang dalam menyebarkan pamflet, brosur atau poster, menghadiri demonstrasi yang diselenggarakan kandidat

4. Tahap Penetrasi

Pada tahap penetrasi ini, seorang kandidat telah mempunyai gagasan berupa program-program kerja yang telah hadir dan berhasil mendapat tempat di hati masyarakat

5. Tahapan distribusi

Tahapan distribusi atau dapat disebut dengan tahap pembuktian janji-janji kampanye setelah kandidat berhasil memperoleh kekuasaan.

Selanjutnya Penulis membuat defenisi operasional dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Defenisi Oprasional

Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator
1. Mengetahui dan mengkaji strategi pemenangan pemilihan kepala desa terpilih di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017	1. Identifikasi	1. Slogan
	2. Legitimasi	1. Legitimasi formal 2. Dukungan Masyarakat
	3. Partisipasi	1. Keterlibatan masyarakat
	4. Penetrasi	1. Penetrasi ekonomi 2. Penetrasi sosial
	5. Distribusi	1. Program kerja kandidat

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*). Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2004:6)

Dari pengertian diatas, apabila kitapersempit kembali dari aspek tujuanpada dasarnya secara umummemiliki maksud membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian inidigunakankarena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan atau melukiskan keadaan, objek atausubjek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta sebagaimana adanya.

Jenis penelitian deskriptif kualitatifyang digunakandalam penelitianini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pemenangan kepala desa terpilih desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2017 secara mendalam dan komprehensif. Peneliti mengumpulkan data dan fakta-fakta yang ada untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, dan indikator yang diteliti terkait strategi pemenangan yang dilakukan oleh kepala desa terpilih desa Gotowasi.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Pemilihan lokasi ini karena kepala

desa terpilih Mujid H. Hajarat mampu mengungguli perolehan suara dari calon lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau maksud tertentu. Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi yang dijadikan data primer dalam penelitian ini yakni data yang dihasilkan merupakan hasil pengamatan dari kegiatan kampanye politik kepala desa terpilih Mujid H. Hajarat serta wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 5 orang narasumber yaitu:

- 1) Kepala Desa terpilih yaitu : Mujid H. Hajarat
- 2) Satu orang dari tim pemenangan yaitu: ketua tim pemenangan
- 3) Satu orang dari tokoh masyarakat desa Gotowasi
- 4) Satu orang dari Panitia pemilihan kepala desa Gotowasi akan diberikan pertanyaan terkait pemilihan kepala desa di Desa Gotowasi

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut (*second hand information*) atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data tersebut berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Data diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku-buku penunjang, mempelajari dan melakukan olah data profil dari Desa Gotowasi Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai foto-foto kegiatan kampanye dari tim kampanye Mujid H. Hajarat, pemberitaan media massa, cetak dan elektronik mengenai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kepala desa terpilih Mujid H. Hajarat, yang juga digunakan sebagai data tambahan untuk memperkaya substansi penulisan skripsi.

4. Unit Analisis

Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah kepala desa terpilih desa Gotowasi, Tim pemenang kepala desa serta pihak-pihak lainnya yang berkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan

data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh. serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambar hasil penelitian.

Miles dan Hebermes dalam Bungin (2003: 229) mengatakan bahwa selama peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan, peneliti juga melakukan analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah dengan analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Secara rinci, tahapan analisis data dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan dilapangan oleh peneliti dengan metode yang telah ditentukan serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan cara memberikan kode terhadap data-data yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan dari perumusan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam tulisan atau laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami. Penyajian data juga dilakukan dalam bentuk: gambar, dan berbagai kutipan penjelasan dari informan. Kutipan langsung yang digunakan untuk menjelaskan proses perencanaan strategi kampanye dan mengetahui citra yang diharapkan muncul dalam benak masyarakat sebagai sasaran kegiatan kampanye, sedangkan gambar digunakan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye Kepala Desa Mujid H. Hajarat.

4. Penarikan Kesimpulan

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu penulis dalam menarik suatu kesimpulan yang akan mengarahkan pada pengambilan kesimpulan berikutnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses pengumpulan data dengan tetap meninjau data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk memastikan bahwa data

yang dibutuhkan sudah lengkap, sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan tepat berdasarkan data-data yang sudah terkumpul. Data hasil wawancara dianalisis, selama proses analisis dan penyajian data, penulis juga terus melakukan penyempurnaan atau bahkan merevisi kerangka analisis yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Tujuannya adalah untuk membantu penulis dalam menarik suatu kesimpulan yang akan mengarahkan pada pengambilan kesimpulan berikutnya.